



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Ketika media cetak dalam sejarahnya dipandang lebih berperan sebagai agen perubahan sosial dan politik, medium film sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Hal tersebut dikarenakan film tidak hanya sekedar bercerita dan berbicara soal pesan saja, tetapi juga menunjukkan visualisasinya sehingga mempercepat proses khalayak dalam menerima pesan ataupun menganggapnya sebagai realitas objektif(Sobur, 2006:127).

The assumed link between cinema and social criticism begins with the fact that moving pictures, a nineteenth century invention, exhibited such an amazing similiarity to the social world, not as it was but as it appeared to it's observers. This likeness was remarked upon again and again at the inception of cinematograph (Donald and Renov, 2008: 362).

Kemampuan serta kemudahan yang dimiliki medium film tersebut selanjutnya memicu fenomena pemberdayaannya sebagai *political media*. *Political media* itu sendiri bisa diartikan sebagai medium yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal terkait politik.

Pemberdayaan film sebagai *political media* bukan hal baru. Sejak penciptaannya pada tahun 1878, film sudah kerap digunakan sebagai alat propaganda ataupun kritik sosial politik. Sebagai gambaran, jauh sebelum Perang

Dunia II dan Perang Dingin, Amerika sudah melakukan propaganda lewat *The Birth of A Nation* (1915), film mengenai perjuangan tentara Amerika saat Perang Saudara dan Masa Rekonstruksi.

Alasan pemberdayaan ini pada umumnya didasari satu anggapan bahwa film lebih mampu menggerakkan individu dalam jumlah besar. Film yang terarah diyakini mampu mempengaruhi individu untuk mengiyakan pesan-pesan politik yang disampaikan.

The mass media serve as a system for communicating messages and symbols to the general populace. It is their function to amuse, entertain, and inform, and to inculcate individuals with the values, beliefs, and codes of behaviour that will integrate them into the institutional structures of the larger society. In a world of concentrated wealth and major conflict of interest, to fulfill this role requires systematic propaganda (Chomsky, 1988: 01).

Douglass Kellner adalah salah satu individu yang mengkaji fenomena ini. Dalam esai bertajuk *Film, Politics, and Ideology: Reflections on Hollywood Film in The Age of Reagan*, ia mendeskripsikan bagaimana film berperan sebagai media politik di Amerika pada tahun 60an. Dijelaskan olehnya bahwa pada saat itu Hollywood marak mengkampanyekan pesan liberalisme, anti perang, feminis, anti-rasialisme, dan pergerakan kiri sebagai *counter movement* terhadap sifat konservatif pemerintahan Ronald Reagan melalui film.

Many 1960s films transcoded the discourses of the anti-war, new left, student movement, as well as the feminist, black power, sexual liberationist, and countercultural movements, producing a new type of socially critical Hollywood film. Films....transcoded, that is to say, translate, representations, discourses, and myths of everyday life into specifically cinematic terms, as when Easy Rider translates and organizes the images, practices, and discourses of the 1960s counterculture into a cinematic text.¹

Deskripsi Kellner tidak berhenti sampai di situ. Dalam buku *Cinema Wars* yang mengkhuskan pada pemerintahan George Bush dan Dick Cheney, Kellner melanjutkan bahwa penggunaan film sebagai media politik pada akhirnya berkembang menjadi film pemerintah versus film non-pemerintah. Contoh nyata menurut Kellner adalah pasca 9-11 di mana produser film terlecut untuk mensatirkan sisi buruk pemerintahan Amerika Serikat sementara di satu sisi pemerintah sendiri melakukan demagogi lewat film-film patriotik sebagai pelengkap *War on Terror*. Beberapa judul film yang bisa disebut adalah *United 93* (2006), *World Trade Center* (2006), dan *The Kingdom* (2007) sebagai film pro pemerintah sementara *Fahrenheit 9/11* (2004), *Syriana* (2005), dan *Lions for Lambs* (2007) sebagai kontra pemerintah. Dari titik ini, Kellner menyimpulkan bahwa film sudah bisa dianggap sebagai produk persaingan ideologi politik.

Film and media culture has been a battleground between competing social groups, with some films advancing liberal or radical positions and other reproducing conservatives ones. Many films, however, are politically ambiguous, exhibiting a contradictory mixture of political motifs or attempts to be apolitical...From this viewpoint, contemporary Hollywood cinema can be read as a contest of representation and a contested terrain that reproduces existing social struggles and transcode the political discourses of the era (Kellner, 2010: 01-02).

Hingga saat ini, terhitung tidak sedikit kuantitas film yang bertema politik. Boleh dikatakan bahwa hampir semua isu dari tema bersangkutan sudah dibahas. Meskipun begitu, dari sekian banyak tersebut, penggambaran pemerintahan koersif (sistem pemerintahan yang menggunakan paksaan dan kekerasan) seperti totaliter dan otoriter adalah salah satu yang kerap muncul, baik sebagai kritik ataupun dukungan.

Transkode atau manifestasi pemerintahan koersif tersebut tentunya bisa dicapai lewat berbagai metode, salah satunya melalui penggambaran organisasi atau pemerintah yang mengontrol berbagai aspek kehidupan sosial politik. Contoh bisa dilihat pada *Nineteen Eighty-Four* (1984) karya George Orwell di mana film tersebut memperlihatkan pemerintahan koersif melalui gambaran *Inner Party* (Pemerintah) yang memiliki mekanisme kontrol terhadap komunikasi, ekspresi, kepercayaan, dan kehidupan *Proles* (Proletar). Contoh lain bisa dilihat pada film *Robocop* (1987) di mana terdapat organisasi OCP (*Omni Consumer Product*) yang memprivatisasi wilayah Detroit untuk menguasai segala aspek terkait dengannya.

Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa visualisasi pemerintahan koersif tidak terbatas pada film yang bersifat “realistik” (non-fantasi) saja. Film bergenre fantasi, animasi, atau sains fiksi juga bisa difungsikan untuk menyampaikan hal yang sama. Beberapa judul seperti *The Incredibles* (2004), *Robocop* (1987), *Watchmen* (2009), *Alice in Wonderland* (1951), *Brave New World* (1988), *THX 1138* (1971), *Equilibrium* (2002), dan *The Matrix Trilogy* (1999, 2002, 2003) adalah sejumlah contoh yang bisa disebutkan.

Di sisi lain, tidak sedikit juga jumlah film dokumenter yang bisa memperlihatkan bentuk-bentuk pemerintahan koersif. Jurnalis sekaligus sutradara Michael Moore adalah contoh individu yang kerap berkuat di tema ini. Lewat sejumlah filmnya yang “menyudutkan” pemerintahan Amerika seperti *Fahrenheit 9/11* (2004), *Sicko* (2007), serta *Capitalism: The Love Story* (2009), ia mencoba

menyampaikan pesan bahwa ada yang “salah” dengan jalannya pemerintahan di Amerika semasa Presiden George W. Bush memimpin.

Melihat adanya kecenderungan film dikonstruksikan sebagai penggambaran pemerintahan koersif, baik sebagai kritik ataupun dukungan, penelitian terhadap film bertema pemerintahan koersif dilakukan.

Film yang diteliti adalah *V for Vendetta* (2006), sebuah film hasil adaptasi *graphic novel* (komik) berjudul sama karya Alan Moore dan David Lloyd. Proses adaptasi itu sendiri dilakukan oleh studio film ternama Warner Bros dengan Andy Wachowski dan Larry Wachowski sebagai penulis naskah serta James McTeigue sebagai sutradara. Adapun hal utama yang diteliti adalah bagaimana *V for Vendetta* merepresentasikan totaliterisme.

V for Vendetta dipilih karena berbeda dengan film-film adaptasi komik (film superhero) pada umumnya. Di saat kebanyakan film-film adaptasi komik mengemabil tema heroisme, *V for Vendetta* menggunakan tema *political thriller* terkait totaliterisme.

Adanya unsur totaliterisme di dalam film *V for Vendetta* diperkuat oleh jurnal produksinya di mana sang sutradara, James McTeigue, berkata bahwa film ini memang dikonstruksikan sebagai penggambaran totaliterisme. Selain itu, ditambahkan olehnya bahwa *V for Vendetta* juga diproduksi untuk memberi gambaran seperti apa negara yang tidak lagi dipimpin oleh mereka yang mewakili aspirasi rakyat.

Perlu diakui bahwa ada kemungkinan *V for Vendetta* diproduksi bukan sebagai film yang kritis secara politik sepenuhnya. Meskipun begitu, bagaimana nilai-nilai totaliterisme direpresentasikan olehnya tetaplah hal yang menarik untuk dikaji karena pada dasarnya film digunakan untuk menggerakkan penonton agar menerima ideologi, kritik, atau sikap politik tertentu yang diperlihatkan sebagai kebenaran atau “sesuatu yang sudah sebagaimana mestinya”(Kellner, 2001: 59).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, masalah penelitian akan dirumuskan dalam bentuk dua pertanyaan yaitu:

1. Apa saja tanda-tanda pada *V for Vendetta* yang merepresentasikan totaliterisme?
2. Bagaimana tanda-tanda pada *V for Vendetta* tersebut merepresentasikan totaliterisme?
3. Apa makna dari tanda-tanda totaliterisme dalam *V for Vendetta*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan tanda-tanda pada *V for Vendetta* yang merepresentasikan totaliterisme
2. Mendeskripsikan bagaimana tanda-tanda pada *V for Vendetta* merepresentasikan totaliterisme.
3. Menjelaskan makna tanda-tanda totaliterisme dalam *V for Vendetta* tersebut.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian akan dibagi menjadi dua jenis yaitu signifikansi secara akademik dan praktis.

1. Signifikansi Akademik

Signifikansi akademik dari penelitian ini adalah menambah referensi mengenai analisis atau penelitian mengenai teks media, khususnya film, dengan teori semiotika. Penelitian ini dapat memberikan gambaran konsep dan analisis yang memungkinkan khalayak memahami apa yang media konstruksikan lewat seperangkat tanda dan bagaimana konstruksi tersebut dilakukan.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi untuk meneliti bagaimana film melakukan konstruksi realitas dengan manipulasi tanda-tanda visual dan non visual.

2. Signifikansi Sosial

Untuk signifikansi sosial, hasil penelitian ini akan mendorong masyarakat untuk bersikap lebih kritis ketika menonton film. Dengan bersikap kritis, khalayak tidak akan serta merta menerima “realitas” yang dikonstruksi oleh film begitu saja karena menyadari bahwa terdapat tujuan atau pembentukan makna tertentu di balik konstruksi tersebut.

Di sisi lain, penelitian ini juga akan memberikan signifikansi berupa pengetahuan untuk memahami medium film bukan sebagai media hiburan saja. Film pada perkembangannya sudah berubah menjadi medium yang mampu menjadi alat kritik sosial, propaganda, dan bahkan sebagai pemicu perubahan sosial sehingga untuk memahami bagaimana fungsi tersebut terwujud diperlukan pengetahuan tersendiri.